



**NERACA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (NKLD)
TAHUN 2001 KABUPATEN ACEH BARAT**



**BUKU II
RANGKUMAN DESKRIPTIF**

**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT
BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH
(BAPEDALDA)**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUPATI ACEH BARAT

Kata Sambutan.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang senantiasa memperhatikan kehidupan hambanya bersama limpahan rahmat, dan sayang Nya kita mampu melaksanakan amanah dan tugas termasuk kemampuan menyajikan Buku Neraca Kualitas Lingkungan hidup Daerah (NKLD) Kabupaten Aceh Barat tahun 2001 dengan tetap mengacu pada pedoman umum penyusunan NKLD.

Lingkungan yang sehat, selain mencerminkan pola kehidupan masyarakat yang bertempat tinggal dilingkungan tersebut juga dapat merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan di daerah bersangkutan. Oleh karena itu pengelolaan lingkungan hidup, bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah semata-mata akan tetapi juga merupakan tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat yang bertempat tinggal dikawasan tersebut. Buku ini memuat berbagai data tentang perubahan demografi, sosial otonomi, pencemaran dan sumber daya alam serta analisis kebijakan yang berisi evaluasi dan rekomendasi program pembangunan. Dengan demikian buku NKLD dapat dimanfaatkan sebagai acuan dalam penyusunan program pembangunan. Buku ini dapat pula merupakan media publikasi yang diharapkan dapat menunjang program pembangunan sektoral dan regional kearah pembangunan yang berwawasan lingkungan sebagai upaya menyongsong hari depan yang lebih baik. *"mari kita mulai sebelum sangat terlambat."*

Kepada semua pihak, terutama Tim penyusun, saya ucapkan terima kasih atas upaya pembuatan buku ini, semoga bermanfaat.



KATA PENGANTAR

Puji serta syukur kita panjatkan kehadiran Allah Swt, selawat salam sama-sama pula kita sanjungkan kepangkuan alam baginda Rasulullah yang telah membawa ummatnya ke alam beradab dan berpengetahuan.

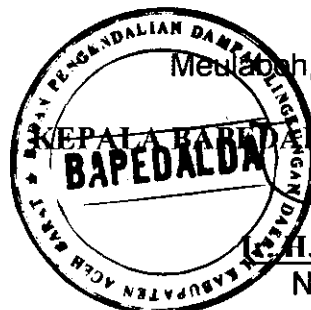
Pertama-tama pada tempatnya saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh anggota tim dan sub tim yang telah turut ambil bagian secara pro aktif mengembangkan kualitas Buku NKLD.

Selanjutnya dalam rangka upaya kita meningkatkan kualitas pembangunan yang diarahkan pada perwujudan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, sudah dapat dipastikan data/keterangan yang lengkap, akurat dan aktual dari berbagai aspek yang berkaitan dengan kualitas lingkungan hidup sangat diperlukan.

Penyusunan buku Neraca Kualitas Lingkungan hidup Daerah (NKLD) tahun 2001 disusun berdasarkan Pedoman Umum dari Menteri Negara Lingkungan Hidup, dengan menyajikan seluruh data dan informasi tentang kondisi kualitas lingkungan daerah tahun 2000 disertai berbagai kebijakan yang telah dan sedang dilaksanakan, atas kerjasama Bapedalda, Bappekab dan Kantor Statistik Kabupaten Aceh Barat.

Mengingat luas dan kompleksnya serta minimnya wadah cakupan data/informasi yang diperlukan berkaitan dengan lingkungan hidup, maka penyusunan buku ini masih jauh dari sempurna, dengan harapan mendapat koreksi dari berbagai pihak, oleh karena itu saran dan kritik sangat diharapkan. Terima kasih atas segala bantuannya. semoga Allah Swt selalu memberkati kita semua. Amin ya rabbal alamin.

Meulaboh, 24 September 2001



KEPALA BARAT BAPEDALDA KABUPATEN ACEH BARAT

H. Tadjuddin Merlian
H. Tadjuddin Merlian

Nip. 390 008 381

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	i
Daftar isi.....	ii
Lambang Kabupaten Aceh Barat.....	iii
Motto Daerah.....	iv
Peta Kabupaten Aceh Barat.....	v
BAB I DEMOGRAFI.....	1
1. Keadaan Demografi.....	1
2. Pertumbuhan Penduduk.....	3
3. Struktur Penduduk.....	12
BAB II DEMOGRAFI SOSIAL.....	16
1. Pendidikan.....	16
2. Ketenaga kerjaan.....	22
3. Fasilitas pendidikan.....	24
4. Fasilitas Kesehatan.....	25
5. Kebersihan.....	26
6. Tempat Buang Air Besar.....	27
7. Komsumsi Air Bersih.....	28
BAB III KEGIATAN SOSIO-EKONOMI.....	30
A. Pendapatan regional Kegiatan Industri.....	30
B. Pertanian.....	37
BAB IV SUMBER PENCEMARAN.....	45
1. Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Aceh Barat.....	45
2. Sumber Utama Pencemaran Udara.....	46
3. Sumber Utama Pencemaran Air.....	46
4. Sumber Utama Pencemaran Limbah Padat dan Sampah Perkotaan.....	47
5. Jumlah Pencemaran Udara.....	47
6. Jumlah Pencemaran Air.....	48
7. Pengendalian Pencemaran Udara.....	48
8. Pengendalian Pencemaran Air.....	48
9. Pengendalian Limbah Padat dan Sampah Perkotaan.....	49
BAB V SUMBER DAYA ALAM.....	50
1. Penggunaan Lahan dan Perubahannnya (Konversi).....	50
2. Sumber daya Mineral dan Energi.....	51
3. Sumber Daya Air.....	55
4. Kawasan Konservasi.....	56
5. Dinamika Flora dan Fauna.....	56



LAMBANG KABUPATEN ACEH BARAT

1. KUPIAH MEUKUTOP

Didalamnya mempunyai 5 (lima) warna, yang mempunyai arti/makna :

- Hitam, artinya Kepahlawanan
- Kuning, artinya Kemakmuran
- Putih, artinya Kesucian
- Merah, artinya Keberanian
- Hijau, artinya Perdamaian

2. SETANGKAI KAPAS

Melambangkan pakaian

3. SETANGKAI PADI DENGAN BUTIRNYA

Melambangkan Kemakmuran

4. RENCONG

Melambangkan Kepahlawanan

5. AL QUR'AN

Melambangkan Pendidikan

MOTTO DAERAH

A. MOTTO PENGABDIAN

Tameh sarang sareng puteng lob lam bara

Udep ngon mufakat adat meu agama

B. MOTTO OPERASIONAL

ACEH BARAT "BERBUDAYA"

B = *BERJAMAN*

E = *ENERGIK/ETOS KERJA*

R = *RAMAH TAMAH*

B = *BERSIH*

U = *ULAMA – UMARA*

D = *DISIPLIN*

A = *ADAT ISTIADAT*

Y = *YAKIN*

A = *AMAN*



NERACA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT
TAHUN 2001



1

BAB – I DEMOGRAFI

1. Keadaan Demografi.

1.1 Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan penduduk itu sendiri. Oleh karena itu kelangsungan pembangunan secara kontinyu sangat erat kaitannya dengan masalah kependudukan, hal ini dikarenakan penduduk sebagai pelaku pembangunan dan sekaligus penduduk itu pulalah yang akan menikmati hasil pembangunan tersebut. Kita ketahui bahwa dimana-mana masalah kependudukan merupakan masalah yang sangat kompleks, sehingga perlu mendapat perhatian penanganan yang serius. Penyusunan perencanaan pembangunan yang benar dan berkelanjutan, harus memperhitungkan perubahan-perubahan yang terjadi dalam masalah kependudukan, karena sifat penduduk itu dinamis sebagai hasil interaksi berbagai variable sosial ekonomi yang mempengaruhi perilaku kependudukan.

Dengan perilaku yang yang selalu berubah ini diperlukan suatu analisis terhadap kependudukan secara menyeluruh yang dapat menggambarkan keadaan dari waktu ke waktu.

Selanjutnya karena hasil pembangunan itu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk yang kesejahteraan penduduk dalam arti luas, maka dengan taraf kehidupan yang cukup untuk keperluan keluarga, diharapkan pula kesempatan memperoleh pendidikan akan meningkat, sehingga Sumber Daya Manusia dapat ditingkatkan yang pada akhirnya akan memperlancar pembangunan dimasa mendatang.

- 1.2. Peningkatan/pertambahan jumlah penduduk menuntut peningkatan fasilitas-fasilitas kehidupan masyarakat, yang berarti tanggung jawab pemerintah masing-masing daerah dalam hal penyediaan fasilitas-fasilitas dimaksud akan semakin bertambah pula. Di sinilah peran pemerintah sebagai pembuat program pembangunan berkelanjutan harus jeli untuk dapat merubah sektor-sektor pembangunan secara berkala sesuai dengan apa yang telah dituangkan dalam PROPEDA yang secara detail tahun per tahunnya diatur pula dengan RENSTRA. Sehingga PROPEDA dan RENSTRA inilah yang perlu pembahasan secara benar dan mendekati akurat yang pada gilirannya akan mencapai out put (hasil) pembayaran sesuai dengan harapan penduduk. Dengan membuat perencanaan pembangunan yang berskala prioritas dinamisasi kependudukan, Insya Allah pelaksanaan pembangunan akan mudah dan lancar. Penyediaan fasilitas kehidupan masyarakat akan semakin bertambah dengan cukupnya fasilitas-fasilitas seperti Sandang, Pangan, Papan, Pendidikan, Lapangan

pekerjaan, Keamanan dan tempat rekreasi yang memadai akan membuat masyarakat hidup tenang dan nyaman dalam memposisikan masing-masing individu sebagai pelaku sekaligus pemetik hasil pembangunan. Hal ini disebabkan oleh modal dasar dan utama pembangunan adalah penduduk yang tinggal dalam wilayah itu sendiri.

2. Pertumbuhan Penduduk

a. Laju Pertumbuhan Penduduk

Pada umumnya pertumbuhan penduduk suatu Daerah dipengaruhi oleh komponen tinggi rendahnya tingkat kelahiran, tingkat kematian dan tingkat perpindahan (Migrasi). Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi akan menjadi penghambat laju pertumbuhan ekonomi sehingga akan menghambat tujuan dan geraknya roda pembangunan dalam menuju masyarakat sejahtera.

Struktur penduduk Kabupaten Aceh Barat memiliki ciri-ciri yang mirip dengan ciri penduduk Indonesia, terutama dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi dan tidak terkendali serta persebaran penduduk yang tidak merata menimbulkan permasalahan tersendiri dalam hal pemerataan pembangunan.

Sebagai hasil dari interaksi komponen dinamika penduduk yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 1990 berdasarkan Sensus Penduduk (SP) penduduk Aceh Barat berjumlah 326.900 jiwa dan angka tersebut meningkat menjadi 386.120 jiwa pada

tahun 1999. Hal ini selama kurun waktu 1990-1999 rata-rata laju pertumbuhan sebesar 1,87 % pertahun. Laju pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan hasil dua tahun sebelumnya pada kurun waktu 1995-1997 sebesar 1,23 % pertahun. Selama kurun waktu 1998 per Desember 1999 menjadi 1,49 %. Dengan demikian ada kecenderungan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Aceh Barat.

Penurunan laju pertumbuhan penduduk selama periode 1995-1997 diperkirakan terjadi karena lebih cepatnya penurunan tingkat kelahiran menunjukkan bahwa program Keluarga Berencana cukup berperan dalam menurunkan angka kelahiran. Penurunan tingkat kelahiran tahun 1995-1997, dimana tahun 1995 penduduk 0-4 tahun sebanding dengan penduduk 15-19 tahun dan tahun 1999 penduduk 0-4 tahun sedikit berkurang.

Disisi lain selama kurun waktu 1998-2000, terjadi penurunan laju pertumbuhan penduduk karena faktor keamanan yang tidak kondusif. Hal ini menyebabkan banyak warga yang pindah, mengungsi dan eksodus terutama masyarakat pendatang.

Jika di lihat menurut daerah-daerah perkotaan dan pedesaan menunjukkan bahwa dalam kurung waktu 1998-2000 menunjukkan laju pertumbuhan penduduk yang menurun, dan hampir merata baik diwilayah perkotaan maupun di wilayah pedesaan. Hal ini berbeda dengan periode tahun-tahun sebelumnya, yakni periode 1996-1998 laju pertumbuhan penduduk didaerah perkotaan jauh lebih tinggi dari pada daerah pedesaan. Di daerah perkotaan rata-rata laju pertumbuhan

penduduk selama periode 1995-1997 sebesar 5,97 % per tahun dan di daerah pedesaan selama periode yang sama sebesar 2,41 % per tahun.

Tinggi laju pertumbuhan penduduk di daerah perkotaan di mungkin selain Karena terjadi pengembangan daerah pedesaan menjadi daerah perkotaan, juga dipengaruhi oleh migrasi terutama perpindahan penduduk dari desa ke kota (urbanisasi) dorongan penduduk untuk melakukan perpindahan dari desa ke kota antara lain dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi dan keamanan. Selain itu karena daerah perkotaan merupakan pusat pendidikan yang mempunyai fasilitas dan mutu yang lebih baik, serta lengkapnya fasilitas-fasilitas lain yang menarik minat pendatang untuk berdomisili di daerah perkotaan.

Perpindahan penduduk desa ke kota terlihat baik pada tahun 1998 maupun tahun 2000 bahwa untuk kelompok umur pertengahan dipedesaan menjerok kedalam dan diimbangi di daerah perkotaan yang menjerok keluar. Hal ini bisa dimaklumi karena pada usia tersebut sebagian penduduk, selain untuk mengadu nasib di kota, juga untuk mencari pekerjaan, dan karena mereka melanjutkan sekolah terutama perguruan tinggi, namun demikian tidak menutup kemungkinan untuk sekolah lanjutan.

Jika dilihat jenis kelamin, tahun 1999 dan tahun 2000, rata-rata laju pertumbuhan penduduk perempuan lebih tinggi dari rekan laki-laki. Hal ini dimungkinkan karena tingkat migrasi penduduk laki-laki lebih tinggi dari pada penduduk perempuan. Migrasi keluar penduduk laki-laki. Terutama didominasi oleh penduduk usia kerja baik untuk mencari

nafkah maupun untuk melanjutkan pendidikan. Hal ini dikarenakan adanya budaya yang keliru yang masih melekat dimasyarakat Indonesia, karena kabupaten Aceh Barat yang membatasi gerak/pergaulan penduduk perempuan berbatas di lingkungan sekeliling rumah. Selain itu juga seperti dimaklumi bahwa masyarakat kabupaten Aceh Barat terutama di kecamatan Johan Pahlawan, penduduk umumnya adalah pendatang.

Tingkat laju pertumbuhan penduduk kabupaten Aceh Barat tergolong masih tinggi disbanding tingkat Propinsi, walaupun demikian rata-rata laju pertumbuhan cenderung menurun. Tingginya tingkat pertumbuhan juga disebabkan oleh migrasi Netto yang positif pada tahun 1997. Sebagaimana kita ketahui bahwa kabupaten Aceh Barat merupakan daerah penerima transmigrasi.

b. Fertilitas.

Salah satu komponen pokok yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk adalah fertilitas. Selain migrasi, fertilitas dimungkinkan merupakan penyebab utama dalam dinamikan kependudukan di kabupaten Aceh Barat. Fertilitas adalah hasil reproduksi nyata dari seorang wanita atau sekelompok wanita. Dalam hal analisis fertilitas, banyak ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kelahiran dari penduduk. Kalau pencatatan penduduk sudah berjalan dengan baik, biasanya registrasi kelahiran, merupakan data dasar yang paling ideal digunakan sebagai sumber perhitungan tingkat kelahiran secara langsung.

Di kabupaten Aceh Barat yang belum mempunyai pencatatan kependudukan (catatan kelahiran) yang baik, perhitungan tingkat kelahiran secara tidak langsung adalah alternatif yang sering digunakan dengan berbagai teknik perhitungan demografi, dan dengan menggunakan data yang berawal dari data sensus atau survey, dapat dihitung tingkat kelahiran total (TFR), tingkat kelahiran spesifik umur (ASFR), atau ukuran-ukuran lain yang dapat digunakan sebagai bahan analisis fertilitas. Namun dalam analisis disini karena keterbatasan data yang ada, tingkat fertilitas yang hanya dilihat dari sisi jumlah wanita usia subur dan jumlah anak lahir hidup. Hal ini dengan pertimbangan bahwa karakteristik tersebut merupakan data dasar perhitungan tingkat kelahiran secara tidak langsung.

Jumlah anak lahir hidup merupakan banyaknya anak yang dilahirkan dengan menunjukkan adanya tanda-tanda kehidupan walaupun sesaat. jumlah anak lahir hidup menggambarkan kemampuan seorang wanita dengan melahirkan anak selama masa produksinya. Rata-rata anak lahir hidup setiap penduduk perempuan (paritas ALH) merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat fertilitas. Lain hanya dengan Total Fertilitas Rate (TFR) dan Crude Birth Rate (CBR) yang menggambarkan kelahiran kumulatif dalam waktu tertentu (1 tahun). Rata-rata jumlah anak lahir hidup menggambarkan kelahiran kumulatif oleh seorang wanita selama masa reproduksinya.

Tingkat fertilitas sangat dipengaruhi oleh komposisi umur penduduk usia 15 - 49 tahun. Karena semakin besar persentase pen-

duduk wanita usia 15-49 tahun, berarti semakin besar pula jumlah pasangan usia subur yang mempunyai resiko untuk melahirkan. Pergeseran posisi umur penduduk wanita usia 15-49 tahun, dimana pada tahun 1999 kelompok umur 15-49 tahun lebih rendah dari tahun 1998. Fenomena ini menandakan adanya pergeseran atau penurunan tingkat fertilitas, karena pada usia tersebut resiko melahirkan lebih besar dibandingkan usia tua. Apabila komposisi umur 15-29 tahun kecil, otomatis resiko kelahiran akan kecil pula. Penurunan tingkat fertilitas lebih terlihat menurut kelompok umur.

Jika dilihat per kecamatan yang mempunyai resiko kelahiran tinggi (persentase wanita usia subur 15 – 29 tahun besar) adalah kecamatan Teunom sebesar 52,1%, disusul Seunagan sebesar 47,2%. Sedangkan terendah adalah kecamatan Beutong dan kecamatan Jaya masing-masing sebesar 41,51% dan 43,1%. Tetapi jika dilihat di kecamatan Krueng Sabee, faritas ALH terendah yaitu sebesar 1,31%. Paritas ALH tertinggi terjadi di kecamatan Sampoiniet sebesar 1,93% disusul kecamatan Beutong sebesar 1,83%. Hal ini bisa dimaklumi karena pada kedua kecamatan ini persentase usia 15 – 29 tahun cukup besar.

.. **Mortalitas** •

Mortalitas merupakan salah satu komponen yang berpengaruh dalam dinamika kependudukan. Tingkat mortalitas dapat menggambarkan keberhasilan suatu wilayah atau negara dalam pembangunan di bidang kesehatan. Tingkat mortalitas yang tinggi merupakan kendala

serius dalam pembangunan, apalagi tingkat fertilitasnya juga tinggi. Hal ini demikian merupakan salah satu ciri negara yang terbelakang.

Tingkat mortalitas dapat diturunkan antara lain dengan perbaikan sarana kesehatan, perbaikan kualitas lingkungan fisik dan peningkatan gizi masyarakat. Akan tetapi hal ini sangat tergantung dari kesadaran masyarakat akan kesehatan itu sendiri. Peningkatan kesadaran kesehatan masyarakat dapat ditempuh antara lain melalui peningkatan pendidikan ataupun melalui penyuluhan-penyuluhan kesehatan sampai tingkat desa.

Seperti pada analisis sebelumnya, karena keterbatasan data untuk menghitung secara langsung, pada analisis mortalitas akan digunakan angka hasil perhitungan secara tidak langsung. Indikator-indikator mortalitas yang akan dibahas pada analisis ini antara lain faritas Anak Masih Hidup (AMH) dan proporsi AMH. Karakteristik paritas AMH, ALH dan wanita usia subur merupakan dasar perhitungan secara tidak langsung untuk Angka Kematian Bayi (AKB), Kematian Anak (AKA) dan Harapan Hidup (EO). Semakin rendah AKB/AKA akan semakin tinggi harapan hidup dalam suatu wilayah yang berarti pembangunan kesehatan sudah cukup berhasil.

d. Migrasi

Yang dimaksud dengan migrasi adalah mereka yang melakukan perpindahan dari satu unit administrasi ke unit administrasi yang lain untuk menetap paling tidak selama 6 bulan ke atas. Dalam penulisan ini, migran yang dicakup adalah migran semasa hidup, yaitu yang tempat

duduk wanita usia 15-49 tahun, berarti semakin besar pula jumlah pasangan usia subur yang mempunyai resiko untuk melahirkan. Pergeseran posisi umur penduduk wanita usia 15-49 tahun, dimana pada tahun 1999 kelompok umur 15-49 tahun lebih rendah dari tahun 1998. Fenomena ini menandakan adanya pergeseran atau penurunan tingkat fertilitas, karena pada usia tersebut resiko melahirkan lebih besar dibandingkan usia tua. Apabila komposisi umur 15-29 tahun kecil, otomatis resiko kelahiran akan kecil pula. Penurunan tingkat fertilitas lebih terlihat menurut kelompok umur.

Jika dilihat per kecamatan yang mempunyai resiko kelahiran tinggi (persentase wanita usia subur 15 – 29 tahun besar) adalah kecamatan Teunom sebesar 52,1%, disusul Seunagan sebesar 47,2%. Sedangkan terendah adalah kecamatan Beutong dan kecamatan Jaya masing-masing sebesar 41,51% dan 43,1%. Tetapi jika dilihat di kecamatan Krueng Sabee, faritas ALH terendah yaitu sebesar 1,31%. Paritas ALH tertinggi terjadi di kecamatan Sampoiniet sebesar 1,93% disusul kecamatan Beutong sebesar 1,83%. Hal ini bisa dimaklumi karena pada kedua kecamatan ini persentase usia 15 – 29 tahun cukup besar.

c. Mortalitas •

Mortalitas merupakan salah satu komponen yang berpengaruh dalam dinamika kependudukan. Tingkat mortalitas dapat menggambarkan keberhasilan suatu wilayah atau negara dalam pembangunan di bidang kesehatan. Tingkat mortalitas yang tinggi merupakan kendala

serius dalam pembangunan, apalagi tingkat fertilitasnya juga tinggi. Hal ini demikian merupakan salah satu ciri negara yang terbelakang.

Tingkat mortalitas dapat diturunkan antara lain dengan perbaikan sarana kesehatan, perbaikan kualitas lingkungan fisik dan peningkatan gizi masyarakat. Akan tetapi hal ini sangat tergantung dari kesadaran masyarakat akan kesehatan itu sendiri. Peningkatan kesadaran kesehatan masyarakat dapat ditempuh antara lain melalui peningkatan pendidikan ataupun melalui penyuluhan-penyuluhan kesehatan sampai tingkat desa.

Seperti pada analisis sebelumnya, karena keterbatasan data untuk menghitung secara langsung, pada analisis mortalitas akan digunakan angka hasil perhitungan secara tidak langsung. Indikator-indikator mortalitas yang akan dibahas pada analisis ini antara lain faritas Anak Masih Hidup (AMH) dan proporsi AMH. Karakteristik paritas AMH, ALH dan wanita usia subur merupakan dasar perhitungan secara tidak langsung untuk Angka Kematian Bayi (AKB), Kematian Anak (AKA) dan Harapan Hidup (EO). Semakin rendah AKB/AKA akan semakin tinggi harapan hidup dalam suatu wilayah yang berarti pembangunan kesehatan sudah cukup berhasil.

d. Migrasi

Yang dimaksud dengan migrasi adalah mereka yang melakukan perpindahan dari satu unit administrasi ke unit administrasi yang lain untuk menetap paling tidak selama 6 bulan ke atas. Dalam penulisan ini, migran yang dicakup adalah migran semasa hidup, yaitu yang tempat

tinggal pada waktu berbeda dengan tempat lahirnya dan migran baru, yaitu tempat tinggal pada waktu pendataan berbeda dengan tempat tinggal 5 tahun sebelumnya. Adapun batasan unit administrasi yang digunakan adalah Kabupaten dan Daerah tingkat II untuk migran semasa hidup serta kabupaten untuk migran baru.

Arus perpindahan penduduk atau migran seumur hidup yang masuk ke kabupaten ini terbanyak dari kabupaten Pidie sebesar 47,3%, sementara arus penduduk keluar kabupaten ini terbanyak juga ke Kodya Banda Aceh, yaitu sebesar 46,3%. Hal ini dimungkinkan karena adanya kemudahan sarana transportasi. Migran semasa hidup yang menuju Kodya Banda Aceh umumnya bertempat tinggal di daerah perkotaan (69,2%), sebaliknya migran semasa hidup yang masuk dari Banda Aceh, lebih besar yang menuju daerah pedesaan (49,8%). Nampaknya migran ke Kodya Banda Aceh sebagian besar bermotif melanjutkan pendidikan di daerah perkotaan yang kemudian berkeluarga dan kembali ke pedesaan dengan membawa keturunan yang lahir dirantau.

Arus migrasi selama hidup ke dan dari kabupaten yang cukup dominan adalah kabupaten-kabupaten tetangga yang ternyata telah mampu mengalahkan arus terhadap kabupaten di Propinsi Daerah Istimewa Aceh bahkan Sumatera Utara. Arus masuk kedua terbesar yaitu dari Pidie, baru diikuti oleh Aceh Selatan. Hal ini memperkuat dugaan bahwa untuk migrasi masuk, motivasinya adalah transmigrasi dan kembali ke tanah asal. Sedangkan untuk migrasi keluar adalah mencari pekerjaan dan melanjutkan pendidikan. Motivasi pekerjaan dan

pendidikan telah mengakibatkan arus netto terhadap Kodya Banda Aceh dan Aceh Besar.

Dari data migrasi pada tingkat kecamatan-kecamatan, terlihat adanya dominasi penduduk usia produktif (25-63 tahun) yang mencapai 70% dari seluruh migran. Penduduk non migran yang tergolong produktif hanya mencapai 40%. Sementara itu lebih tinggi persentase penduduk usia 0 – 14 tahun penduduk non migran dibandingkan dengan migran mempunyai beberapa kemungkinan penjelasan. Pertama, para migran umumnya terdiri dari atas individu dewasa atau pemuda yang merantau untuk menuntut ilmu atau mencari pekerjaan. Kedua, walaupun migran tersebut sudah berkeluarga, mereka merupakan keluarga-keluarga kecil yang hanya mempunyai anak sedikit. Jumlah anak yang banyak atau jumlah anggota rumah tangga yang banyak akan menyulitkan suatu keluarga atau rumah tangga untuk berpindah-pindah. Sementara itu non migran, nampaknya cenderung mempunyai anak yang lebih banyak dari pada pendatang. Dengan demikian banyak migran yang telah berkeluarga meninggalkan keluarga, terutama di pedesaan, untuk pindah ke kecamatan atau Daerah tingkat II lain untuk mencari pekerjaan.

Karena batas unit administrasi dari migran atau perpindahan penduduk adalah kecamatan, maka dapat dilihat disparitas menurut kecamatan. Dengan demikian dapat diketahui kecamatan mana yang paling diminati maupun yang paling tidak diminati oleh pendatang. Di kecamatan Johan Pahlawan, penduduknya didominasi oleh pendatang atau mereka yang lahir diluar Johan Pahlawan. Sebagai ibukota

kabupaten disamping merupakan salah satu pusat ekonomi masyarakat dan berbagai sarana pelayanan masyarakat di kabupaten Aceh Barat.

3. Struktur Penduduk

a. *Komposisi Umur*

Pengelompokan penduduk menurut umur dan jenis kelamin menjadi salah satu aspek penting dalam studi kependudukan, karena struktur umur dan jenis kelamin merupakan karakteristik kependudukan yang mempunyai pengaruh penting terhadap tingkah laku demografi maupun sosial ekonomi data pokok untuk mempelajari masalah kependudukan.

Struktur penduduk kabupaten digambarkan oleh kelompok penduduk umur lima tahunan yang berbentuk piramida yang secara umum perlihatkan besarnya kelompok umur muda dan kecilnya kelompok umur tua. Struktur semasa ini mencerminkan relatif masih tingginya tingkat kelahiran maupun tingkat kematian. Tingginya tingkat kelahiran seperti diuraikan diatas antara lain disebabkan oleh besarnya kelompok umur 0 – 4 tahun menyempit. Hal ini menandakan adanya pergeseran struktur penduduk tahun 1998 yang ekspansif atau penduduk muda ke struktur penduduk intermediate atau peralihan.

Struktur umur penduduk akan terlihat lebih sederhana jika kelompok umur lima tahunan dikelompokkan dalam tiga kelompok besar yaitu 0 – 4, 15 – 64 dan 65 ke atas. Dari pengelompokkan tersebut dapat dibedakan struktur umur penduduk menjadi tiga kelompok yaitu struktur umur muda, umur peralihan dan umur tua. Dikatakan struktur

umur muda jika persentase 0 – 14 tahun lebih besar atau sama dengan 40% dan dari umur 65 ke atas kurang dari atau sama dengan 5%. Sedangkan struktur umur tua jika persentase umur 0 – 14 tahun kurang atau sama dengan 30% dan umur 65 ke atas lebih besar atau sama dengan 10%. Hal ini berarti terjadi pergeseran dari struktur umur muda pada tahun 1998 ke struktur umur peralihan pada tahun 1999. Peralihan struktur umur tersebut juga terlihat semakin meningkatnya umur median yaitu umur yang membagi penduduk menjadi dua bagian sama banyak.

Tabel 1.1 Jumlah penduduk Menurut Kelompok Umur Kabupaten Aceh barat

No	Kelompok Umur	1999		2000	
		(000)	%	(000)	%
1.	0 – 14	132.6	0.35	131.9	0.35
2.	15 – 64	235.2	0.61	234.4	0.61
3.	65 +	15.2	0.04	15.1	0.04
Jumlah		383.0	100,00	381.5	100,00

Sumber diolah dari data Statistik Dati II Aceh Barat

Sementara itu struktur umur penduduk setiap kecamatan umumnya mempunyai struktur umur peralihan, dengan persentase terkecil untuk umur 0–14 tahun adalah Teunom yaitu 24,78%, sedangkan persentase tertinggi adalah Samatiga yaitu sebesar 38,92% yang berarti masih tergolong struktur umur muda.

Perubahan struktur umur penduduk juga terlihat dari turunnya angka Rasio Ketergantungan Umur (RKU), tahun 1999 sebesar 1 : 1, 55 % menjadi 1 : 1, 54 % pada tahun 2000. RKU menggambarkan rasio antara penduduk usia 0–14 tahun ditambah usia 65 tahun. Angka ini

sangat bervariasi menurut kecamatan, yaitu berkisar antara 1 : 1, 31% (Johan Pahlawan) hingga 1,93% (Sampoiniet). Untuk lebih rinci, penduduk menurut umur dapat dikelompokkan lebih jauh atas anak-anak (0 – 14 tahun), remaja (15 – 19 tahun), muda (20 – 39 tahun), dewasa (40 – 54 tahun), tua (55 – 64 tahun) dan lanjut usia (65 tahun ke atas).

Secara umum kabupaten Aceh Barat penduduk remaja 15 – 24 tahun adalah 18,43 %, ternyata di kecamatan Beutong adalah 16,32% dan di kecamatan Krueng Sabee sebesar 11,32%. Kemudian untuk penduduk muda berkisar antara 46,42%. Selanjutnya pada proporsi kelompok usia tua terlihat tertinggi di kecamatan Jaya sebesar 4,93%, kecamatan Seunagan 5.93 % dan kecamatan Sungai Mas 4,92%.

Tingginya persentase penduduk usia muda merupakan gambaran masih tingginya kelahiran di suatu daerah sampai dengan tahun 2000. Hal ini juga dapat berpengaruh terhadap rendahnya proporsi penduduk lansia walaupun dapat juga dipengaruhi oleh kondisi kesehatan di daerah tersebut. Sementara itu tinggi proporsi penduduk lansia yang dikombinasikan dengan erndahnya proporsi penduduk muda ke Krueng Sabee terutama diakibatkan oleh tingginya arus keluar dari penduduk usia muda dan dewasa.

b. Komposisi Jenis Kelamin

Rasio jenis kelamin tahun 1999 dan tahun 2000 penduduk wanita lebih kecil dari laki-laki yaitu dengan rasio jenis kelamin sebesar 96,31%, sedangkan tahun 2000 keadaan sama dengan rasio jenis kelamin sebesar 96,03%. Menurut kelompok umur, sampai umur 14 tahun

umumnya rasio jenis kelamin masih di atas 96,01 kemudian turun sampai umur 34 tahun untuk tahun 2000. Seperti telah diuraikan di atas, bahwa penduduk laki-laki pada usia kerja atau usia sekolah atau tingkat mobilitasnya tinggi. Secara umum rasio jenis kelamin tahun 2000 untuk 35 sampai 74 tahun rata-rata 97,31%.

c. Komposisi Daerah Perkotaan dan Pedesaan

Bahwa sebagian penduduk pedesaan melakukan urbanisasi ke kota baik tahun 1999 maupun 2000. Terbukanya kesempatan kerja dan tersedianya berbagai fasilitas, terutama pendidikan, di daerah perkotaan menarik penduduk pedesaan untuk bermigrasi ke daerah perkotaan. Perpindahan penduduk tersebut dilakukan baik penduduk laki-laki maupun perempuan dengan alasan utama untuk mencari pekerjaan atau melanjutkan sekolah di daerah perkotaan. Arus perpindahan ini masih akan tetap berlangsung jika kesenjangan pembangunan antara daerah perkotaan dengan pedesaan masih ada.

2

BAB II DEMOGRAFI SOSIAL

1. Pendidikan

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 1 mengamatkan kepada penyelenggara Negara Indonesia agar "setiap Warga Negara Indonesia berhak mendapatkan pengajaran".

Amanat ini ditindak lanjuti oleh pemerintah kita dengan terus menerus berupaya untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan diseluruh Daerah dalam Wilayah Republik Indonesia.

Untuk Daerah Istimewa Aceh Rancangan Keputusan Rapat Kerja Daerah Departemen Pendidikan Nasional tahun 2000 merumuskan Visi dan Misi pendidikan sebagai berikut :

- a. Visi : Di Propinsi Daerah Istimewa Aceh untuk periode 2001–2005 adalah "Terwujudnya individu dan masyarakat mandiri yang berciri Islami, cerdas dan sehat yang mampu mengembangkan potensi intelektual, emosional dan sosial secara seimbang dan harmonis menjadi masyarakat yang memiliki wawasan ilmu pengetahuan dan teknologi, wawasan keunggulan dan wawasan masyarakat belajar, berakhlak mulia, memiliki

tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan serta mampu memelihara dan mengembangkan budaya bangsa”

b. Misi : Dirumuskan sebagai berikut :

1. Menghasilkan peserta didik yang berakhlak mulia serta memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat diterapkan dalam dunia kerja dan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa serta mengembangkan kemampuan lebih lanjut ke jenjang yang lebih tinggi.
2. Menghasilkan peserta didik yang mampu mengembangkan diri sesuai dengan ilmu pengetahuan yang memiliki dan tanggap terhadap kepentingan dan kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.
3. Menghasilkan peserta didik yang memiliki kesadaran dan tanggung jawab sosial untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan bangsa, baik dalam kapasitasnya sebagai individu yang merupakan bagian dari masyarakatnya maupun sebagai makhluk yang akan mempertanggung jawabkan semua tindakannya dihadapan Allah Yang Maha Kuasa.
4. Mempersiapkan generasi muda yang inovatif, kreatif, berakhlak mulia, berwawasan luas, memiliki kesabaran dan mampu bersaing di dalam suasana demokrasi.

5. Mewujudkan masyarakat gemar belajar dan berolah raga agar memiliki tuingkat kesegaran jasmani yang tinggi dan menciptakan bibit olahragawan yang berprestasi.
6. Mewujudkan masyarakat yang memiliki kesadaran dan tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pengembangan nilai-nilai budaya bangsa, perlindungan benda-benda cagar budaya, penumbuhan kreativitas dan apresiasi seni budaya serta pengembangan bahasa dan sastra Indonesia.

Bertambahnya gedung sekolah secara terus menerus dan tumbuhnya kesadaran untuk memperoleh ilmu dalam kehidupan harus ditopang dengan peningkatan daya tampung sekolah bagi penduduk usia sekolah. Untuk melihat kondisi pendidikan di Propinsi Daerah Istimewa Aceh, berikut ini akan diulas mengenai pendidikan yang ditamatkan dan tingkat partisipasi pendidikan yang merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kemajuan tingkat pendidikan masyarakat setempat.

Pendidikan dapat dijadikan indikator kemajuan suatu bangsa, karena dengan pendidikan, kualitas penduduk akan lebih baik. Semakin tinggi tingkat pendidikan suatu bangsa, maka diharapkan semakin tinggi pula produktivitas bangsa tersebut.

Pemerintah kabupaten Aceh Barat terus berusaha untuk memacu pengembangan dibidang pendididikan di seluruh pelosok daerah, baik terhadap sarana maupun prasarana pendidikan. Dengan adanya perhatian

pemerintah daerah terhadap pendidikan ini, diharapkan hasil yang dicapai dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

a. Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan.

Sesuai dengan tujuan pembangunan pendidikan yaitu perlu adanya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), diantaranya melalui kebutuhan akan tingkat pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Tingkat pendidikan penduduk merupakan indikator utama kualitas sumber daya manusia suatu bangsa. Tingkat pendidikan yang ditamatkan menggambarkan jenjang pendidikan yang dapat diselesaikan.

Pendidikan sebagian besar penduduk kabupaten Aceh Barat masih rendah. Menurut data survey sosial ekonomi nasional 1999 Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat, bahwa sekitar 9,41% penduduk berumur 10 tahun keatas tidak/belum pernah bersekolah dan sekitar 33,61% tamat SD. Penduduk yang berpendidikan tamat SLTP 13,05% dan 11,29%, tamat SLTA 0,56%.

Pendidikan sebagian besar penduduk kabupaten Aceh Barat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan diperoleh gambaran adanya perbedaan secara umum tingkat pendidikan perempuan 10 tahun ke atas masih rendah dari laki-laki. Penduduk perempuan 10 tahun ke atas yang tidak/belum pernah sekolah adalah sebesar 15,28%, sementara untuk penduduk laki-laki hanya 13,57%. Disisi lain penduduk yang tamat SLTA kurang lebih sebesar 14,31% untuk laki-laki berbanding 8,2% untuk perempuan. Perbedaan ini disebabkan antara lain karena masih adanya pandangan masyarakat yang mendahulukan anak laki-laki sekolah dibandingkan anak perempuan.

Tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk yang tinggal dipertanian lebih baik dari pada penduduk pedesaan. Penduduk berumur 10 tahun ke atas yang tamat SLTA di daerah perkotaan adalah sebesar 24,31%, sementara di daerah pedesaan hanya 11,21%. Keadaan ini dalam banyak hal menggambarkan bahwa fasilitas sekolah, persediaan lapangan pekerjaan bagi mereka yang berpendidikan relatif tinggi pada umumnya terkonsentrasi di daerah perkotaan. Sehingga penduduk pedesaan akhirnya harus pindah ke kota untuk melanjutkan sekolahnya. Dari data Podes 1997 diketahui bahwa di seluruh kabupaten Aceh Barat hanya ada sebanyak 27 unit sekolah SMU dan pada umumnya sekolah-sekolah tersebut berada di daerah perkotaan.

Walau demikian akhir-akhir ini, penduduk pedesaan lebih maju tentang dunia pendidikan, sehingga kesenjangan tingkat pendidikan penduduk pedesaan dan perkotaan dapat diperkecil. Mulai tersedianya fasilitas pendidikan penduduk pedesaan dari pendidikan SD hingga pendidikan menengah memberi peluang bagi penduduk pedesaan untuk melanjutkan pendidikannya. Disamping faktor-faktor tersebut di atas kondisi sosial ekonomi penduduk pedesaan yang telah lebih baik akan mendorong penduduknya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

b. Penduduk yang masih Sekolah.

Pendidikan dalam masyarakat, dewasa ini sudah dianggap sebagai kebutuhan dasar yang tidak dapat ditunda lagi pelaksanaannya. Akibatnya setiap tahun selalu di temui masalah ketidak seimbangan antara penduduk yang ingin bersekolah atau yang melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi

dengan daya tampung yang tersedia. Penyelesaian masalah ini menuntut atau mengharuskan adanya tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat dibidang pengadaan dan pelayanan pendidikan. Ada sekitar 10% penduduk golongan umur 5 – 6 tahun yang masih sekolah karena memang umumnya anak sekolah pada umur 6 tahun. Pada umur 7 – 12 tahun terdapat sekitar 89,32% penduduk yang masih sekolah, umur 13 – 15 tahun sekitar 71,3%, umur 16 – 18 tahun 69,3% dan umur 19 – 24 tahun 57,31% dari penduduk pada masing-masing kelompok usia sekolah.

Jumlah penduduk yang berusia 5 – 24 tahun yang masih sekolah terbanyak terdapat di kecamatan Johan Pahlawan 74,30%, Samatiga 67,94% dan kecamatan Seunagan 64,78%.

c. Buta Huruf dan Kemampuan Berbahasa Indonesia.

Gambaran umum tentang kecerdasan penduduk dapat ditunjukkan dari kemampuan membaca dan menulis. Untuk meningkatkan baca tulis penduduk, pemerintah telah mengupayakan program pemberantasan buta huruf, namun demikian berdasarkan hasil data yang telah diolah Kantor Statistik Tingkat II Aceh Barat tahun 1999 masih terdapat sekitar 7,94% kabupaten Aceh Barat berumur 10 tahun ke atas yang buta huruf. Dibandingkan menurut jenis kelamin terlihat adanya perbedaan yang nyata antar penduduk laki-laki dan perempuan yaitu 3,82% berbanding 12,09%, ini menunjukkan bahwa kesempatan penduduk perempuan untuk memperoleh pendidikan, baik formal maupun non formal lebih rendah dari laki-laki.

Kecamatan yang mempunyai tingkat buta huruf yang cukup tinggi selama tahun 1998 adalah kecamatan Sungai Mas, Beutong dan Woyla

yaitu masing-masing di atas 6,42%, sedangkan penduduk kecamatan yang tidak mampu membaca dan menulis paling rendah adalah kecamatan Seunagan, Samatiga dan Johan Pahlawan masing-masing di bawah 2,0%. Penduduk berumur 10 tahun ke atas tidak dapat berbahasa Indonesia di kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Barat sebesar 7,305 (laki-laki) serta 8,72% (perempuan) dan secara keseluruhan 8,11%.

Jika dilihat menurut kecamatan, persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang mampu berbahasa Indonesia paling rendah terdapat di kecamatan Sungai Mas, Woyla dan Beutong. Sementara yang paling tinggi yang mampu berbahasa Indonesia terdapat di kecamatan Johan Pahlawan, Samatiga, Seunagan dan kecamatan Kuala.

2. Ketenagakerjaan

a. Kegiatan Penduduk

Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Barat tahun 2000 mempunyai angkatan kerja sebanyak 8.850 orang, tingkat pendidikan mereka didominasi oleh pendidikan tingkat SD sebanyak 3,88% disusul oleh mereka yang berpendidikan SLTP 10,28%, SLTA 57,09% dan Sarjana (S1) 18,41% dan yang ke empat adalah mereka yang berpendidikan belum tamat SD atau tidak tamat SD 14,37%. Diantara angkatan kerja tersebut di atas 1.660 orang dari berbagai tingkat pendidikan yang sedang dalam usaha mencari pekerjaan.

Bersamaan dengan besarnya angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan setelah menamatkan pendidikan mereka, sedangkan pencari

kerja tahun 2000 sudah mencapai 1.660 orang. Jika dirinci jumlah pencari kerja didominasi oleh perempuan.

Tingkat pendidikan pencari kerja yang terdaftar sebagian besar berijazah SLTA yaitu 57,09%, Sarjana (S1) sebanyak 18,41%, SLTP sebanyak 10,21%, Sarjana Muda sebanyak 9,02%, SD sebanyak 3,88% dan Diploma 1 dan 2 sebanyak 1,39%.

Jumlah tenaga kerja yang telah dilantik di KLK Meulaboh selama Pelita VI sebanyak 1.968 orang, yang terdiri dari berbagai macam bidang ketrampilan antara lain bidang mesin motor bensin, sepeda motor, las karbit, reparasi radio dan televisi, bangunan kayu, menetik, menjahit, sulaman benang mas, bordir, salon, meubel rotan dan lain sebagainya. Sebagian besar peserta latihan memiliki ijazah SLTP yaitu 40,2%, ijazah SLTA 33,0% dan ijazah SD sebanyak 25,4%, sedangkan ijazah Sarjana (S1) hanya 1,4%.

Besarnya angkatan kerja laki-laki dan perempuan dalam kaitannya dengan kecamatan adalah bahwa angkatan kerja yang bekerja didominasi oleh kecamatan Seunagan sebanyak 66,8%, disusul Kaway XVI 65,95%, kelompok pencari kerja juga didominasi kecamatan Samatiga sebanyak 11,21% disusul kecamatan Seunagan 10,98%.

b. Pendidikan dan Lapangan Usaha

Lapangan usaha yang umum tersedia dan mampu diisi oleh tenaga kerja di Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Barat adalah :

1. Pertanian, meliputi perikanan, peternakan dan perkebunan
2. Perdagangan

3. Industri
4. Jasa
5. Lain-lain

Diantara lima bidang usaha kesemuanya memerlukan keahlian dan ketrampilan yang dapat diperoleh melalui pendidikan formal (pelatihan-pelatihan atau kursus-kursus).

Namun demikian bidang pertanian yang masih menyerap tenaga kerja yang terbesar, meskipun mereka tidak mempunyai keahlian dalam bidang pertanian. Pekerja yang terserap dibidang pertanian dari berbagai tingkat pendidikan adalah sebanyak 70,78% atau 17.759 orang dari penduduk 10 tahun ke atas, kemudian perdagangan sebanyak 28,634 orang dan urutan ke tiga tentang jasa-jasa sebanyak 26.645 orang.

Jika dilihat komposisi kerja sektoral menurut jenis kelamin maupun pendidikan terlihat bahwa baik pekerja laki-laki maupun perempuan, bagian tersebar adalah mereka yang bekerja di sektor pertanian dan pendidikan SD ke bawah. Hal ini berkaitan dengan kemudahan sektor pertanian untuk menyerap pekerja berpendidikan rendah sekalipun.

3. Fasilitas Pendidikan

Fasilitas pendidikan yang akan dilihat pada kesempatan ini adalah fasilitas sekolah dasar dan menengah di seluruh kecamatan baik yang berada di lingkungan maupun diluar lingkungan. Departemen pendidikan dan kebudayaan tanpa membedakan pemilik atau pengelola sekolah. Berdasarkan data hasil Podes 1997 di seluruh kabupaten Aceh Barat terdapat 397 SD, 68 SLTP, 27 SLTA, 14 sekolah lainnya seperti Diniyah.

Perbandingan antara jumlah sekolah pada ke tiga tingkat tersebut adalah 14,7 berbanding 2,5 berbanding 1 atau dengan kata lain bagi seluruh lulusan dari 14,7 SD tersedia 2,5 SLTP bagi yang ingin melanjutkan sekolah. Demikian pula bagi lulusan dari 2,5 SLTP yang ingin melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi hanya tersedia 1 SLTA.

Secara umum ketersediaan sekolah adalah yang paling baik di kecamatan Johan Pahlawan karena perbandingan jumlah SD, SLTP dan SLTA secara berurutan 4 berbanding 1,14 dan 1. Perbandingan penyediaan sekolah yang terbaik kedua adalah kecamatan Seunagan yaitu 30 buah SD, 8 SLTP dan 3 SLTA. Penyediaan SD, SLTP, SLTA yang paling minim adalah di kecamatan Sungai Mas dan kecamatan Setia Bakti dengan perbandingan masing-masing 6 : 1 : 0 dan 12.2 : 0.

Jarak rata-rata yang harus tempuh untuk pergi sekolah berkisar antara 0,09 km sampai 3,85 km untuk mencapai SD, kemudian 0,21 km sampai 8,79 km untuk menuju SLTP serta 0,372 km sampai 15,62 km untuk mencapai SLTA.

Secara keseluruhan jarak yang ditempuh seorang anak untuk mencapai sekolah 0,4 km untuk SD, 2,4 km untuk SLTP dan 6,7 km untuk SLTA.

4. Fasilitas Kesehatan

Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Barat pada tahun 1999 telah memiliki Rumah Sakit Umum (RSU) yang terdapat di ibukota kabupaten yaitu di jalan Gajah Mada Meulaboh. Di samping RSU juga terdapat 1 Rumah Sakit (TPA) Angkatan Darat, 1 rumah bersalin, 25 Puskesmas,

78 Puskesmas Pembantu dan 29 Klinik KB, 10 Balai Pengobatan dan 488 Posyandu.

Kemudian untuk melayani penduduk kabupaten Aceh Barat dalam bidang kesehatan saat ini tersedia tenaga medis sejumlah 1.725 yang terdiri dari 33 orang dokter, 497 orang Bidan dan 134 para medis.

Secara keseluruhan jarak rata-rata fasilitas pelayanan kesehatan di kabupaten Aceh Barat masih cukup jauh. Untuk mencapai RSU, penduduk harus menempuh jarak antara 0,5 – 70 km.

Dari segi pelayanan kesehatan adanya perkembangan dengan semakin bertambahnya tenaga medis lainnya termasuk dukun bayi terlatih. Dengan demikian setiap 1.000 orang penduduk di kabupaten Aceh Barat mendapat pelayanan kesehatan dari 0,08 orang dokter, 1,32 orang Bidan, 0,35 orang perawat dan 1,34 orang tenaga medis lainnya.

5. Kebersihan.

Penanganan sampah di kabupaten Aceh Barat masih terbatas pada daerah-daerah tertentu, terutama di daerah perkotaan. Namun secara keseluruhan penanganan sampah ini juga terjadi peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dibuktikan dengan berbagai upaya Pemda dalam menyediakan sarana dan prasarana yang menyangkut dengan pengolahan/penanganan sampah, termasuk meningkatkan lembaga pengelolanya dari Badan Pengelola K3 yang dicangkokkan fungsinya pada Camat Johan Pahlawan ditingkatkan menjadi Dinas Kebersihan dan Pertamanan sejak tahun 1999. Dengan demikian sudah barang tentu pula diiringi dengan peningkatan sarana penunjang lainnya seperti : alat

angkutan, personil kerja yang akhirnya peningkatan penyediaan dana dalam APBD dari Rp. 175.000.000,- tahun 1999 menjadi hampir 400.000.000,- tahun 2000.

Selanjutnya mengenai tingkat kesadaran penduduk dalam membantu menangani sampah ini, secara sangat sederhana kami dapat menyajikan gambaran data bahwa untuk kabupaten Aceh Barat baru 45 Desa yang sebagian penduduknya membuang sampah ke tempat sampah, baik ke tempat sampah sendiri maupun diangkut ke tempat pembuangan sampah sementara (TPS) yang tersedia. Kemudian diperkirakan 14 desa membuang sampah dalam lubang yang mereka gali, sedangkan sebagian besar jumlah penduduk umumnya membuang sampah ke tempat yang kurang/tidak semestinya, diantaranya sungai, parit dan lain-lain (data PODES 1999).

6. Tempat Buang Air Besar (TBAB)

Keadaan lingkungan dan perumahan sangat mempengaruhi terhadap kesehatan penduduk, bila dilihat dari segi Tempat Buang Air Besar (TBAB) di kabupaten Aceh Barat masih sangat beraneka ragam. Dengan jumlah penduduk pada tahun 1999 sebesar 377.011 orang pada sekitar 86,013 rumah tangga, penggunaan tempat buang air besar sangat bervariasi dari 16,013 rumah tangga diseluruh kecamatan terdapat 40.013 ribu rumah tangga yang menggunakan kakus sendiri 46,52%, sedangkan yang menggunakan kakus bersama 7457 RT, kakus umum 7,19% dan

sisanya sekitar 32.005 ribu rumah tangga menggunakan fasilitas lainnya 37,21 %.

Dari data yang ada di Kantor Statistik kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Barat tahun 1999 terdapat 86.013 ribu rumah tangga, 36.994 rumah tangga diantaranya menggunakan tempat buang air besar leher angsa atau sekitar 43,01%, sedangkan 65,19 ribu rumah tangga atau sekitar 7,58% menggunakan tempat buang air besar lainnya, diantaranya menggunakan tempat ceplung/cebluk dan 30.982 ribu rumah tangga 36,2% menggunakan pelengsengan dan sisanya sekitar 11.517 rumah tangga 13,19% menggunakan tempat lainnya. Dengan demikian masih cukup besar persentase rumah tangga yang menggunakan fasilitas yang kurang/tidak higienis.

7. Konsumsi Air bersih

Diantara kebutuhan yang sangat vital dalam kehidupan kita salah satunya air, manusia sangat membutuhkan air baik untuk minum, mandi/cuci dan sebagainya. 86.013 rumah tangga di kabupaten Aceh Barat mendapat sumber air minum/masak dari sumber leading sebanyak 7.311 rumah tangga 0,85%, sedangkan 78.702 rumah tangga 99,15% mendapat sumber air minum/masak dari sumber lainnya.

Penduduk yang mengkonsumsi air minum/masak sangat bersih (leading sumber bor) sekitar 3.423 ribu rumah tangga (3,89%), sumur rumah tangga (54,02%) yang mengkonsumsi air minum/masak lainnya.

Kualitas air minum/masak yang dikonsumsi penduduk Aceh Barat ini berada pada tingkat yang lebih baik yaitu 6,67% menikmati air minum/masak segar bersih, 48,72% menggunakan air bersih dan hanya 3,49% yang masih menggunakan air minum/masak tidak bersih. Sedangkan wilayah kecamatan masih sangat memprihatinkan dalam mengkonsumsi air minum/masak adalah kecamatan Woyla, karena penduduk berdomisili di daerah pedesaan tersebut, yang mengkonsumsi air bersih dan sisanya mereka mengkonsumsi air yang tidak bersih.

Secara umum masyarakat kabupaten Aceh Barat yang berpenduduk 377.011 jiwa ini masih mendominasi dalam mengkonsumsi air minum/masak yang bersumber dari air sumur dari sumur dan mata air yang terlindung.

BAB III

KEGIATAN SOSIO-EKONOMI

A. Pendapatan Regional dan Kegiatan Industri.

Diantara beberapa Aspek Tujuan Pembangunan Nasional, Aspek meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang relatif lebih tinggi merupakan salah satunya, disamping juga dimaksudkan untuk lebih meningkatkan pemerataan hasil pembangunan, kemampuan memenuhi kebutuhan pokok, kemandirian dalam pembangunan serta keseimbangan lingkungan hidup dan sumber daya pembangunan.

Dengan menitik beratkan kegiatan pembangunan pada berbagai sasaran tujuan tersebut, diharapkan bahwa agar hidup rakyat di kabupaten Aceh Barat semakin meningkat secara material maupun spiritual.

Keadaan pertumbuhan ekonomi di kabupaten Aceh Barat selama setahun terakhir dapat ditunjukkan antara lain melalui perkembangan pendapatan regional dan kegiatan industri. Informasi tentang pendapatan Regional tersebut disusun dalam beberapa bentuk yaitu meliputi kegiatan dan indikator sosio-ekonomi menurut sektor, maupun distribusi PDRB menurut sektor.

Informasi mengenai berbagai aktivitas ekonomi yang menjadi sumber pendapatan regional diperlukan karena berpautan erat dengan berbagai masalah sosial dan lingkungan hidup, seperti ; kesempatan kerja, produksi barang dan jasa, sumber konsumsi serta sumber-sumber pencemaran (polusi). Taraf hidup rakyat dapat meningkat secara berkelanjutan, jika di satu pihak sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi mampu dikembangkan secara optimal dan pada pihak lain polusi serta sumber-sumber pembangunan yang tersedia dapat dikendalikan. Peningkatan taraf hidup rakyat melalui pendekatan pembangunan demikian relatif lebih mampu menjamin keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara pemenuhan kebutuhan pembangunan di satu pihak dan kemampuan daya dukung lingkungan hidup pada pihak lain. Dalam hal ini sudah dapat dipastikan bahwa informasi mengenai permasalahan-permasalahan yang timbul sebagai dampak pembangunan di berbagai sektor sangat diperlukan, guna mencari upaya / langkah-langkah yang diperlukan untuk meredamnya dalam proses pembangunan tahap berikutnya.

a. Kegiatan sosio-ekonomi menurut sektor.

Secara garis besar kegiatan sosio-ekonomi di kabupaten Aceh Barat dapat* kedalam sembilan sektor mencakupi 42 sub sektor. Kesembilan sektor sosio-ekonomi tersebut pada dasarnya sudah berjalan sejak bertahun-tahun atau dapat dikatakan selama setahun terakhir tidak ada pertumbuhan kegiatan baru. Kalaupun ada, maka hal itu lebih bersifat penambahan skala dari kegiatan yang sudah berkembang sebelumnya.

Kondisi keamanan yang kurang kondusif di daerah, pada akhir-akhir ini, merupakan sebagian dari faktor penyebab krisis ekonomi. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, berdasarkan harga yang berlaku, berbagai kegiatan sosio-ekonomi yang berlangsung di Aceh Barat mampu meningkatkan PDRB Aceh Barat dari Rp.1.031.931,93 juta (tahun 1999) menjadi Rp.1.150.934,60 juta tahun 2000.

Perkembangan PDRB kabupaten Aceh Barat tahun 2000 memperlihatkan terjadinya peningkatan yang tidak berarti, secara makro dapat memberikan gambaran sebagai indikator kemajuan ekonomi dalam mengelola sektor produktif dan memacu laju pertumbuhannya.

Sektor pertanian pada tahun 2000 menyumbang sebanyak 62,64% disusul sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 9,46%, perdagangan, hotel dan restoran sebesar 9,09%, sektor industri pengolahan 5,79% dan sektor pertambangan dan penggalian 0,41%.

Dilihat dari kecamatan berdasarkan tabel SE-2A dan SE-2B PDRB tahun 2000 yang terbesar disumbangkan oleh kecamatan Johan Pahlawan sebesar Rp.198.651,31 juta dan kontribusi PDRB terhadap kabupaten Aceh Barat sebesar 100% dari non migas.

b. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan PDRB kabupaten Aceh barat atas dasar harga berlaku terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Selama periode tahun 1996-2000 secara rata-rata mengalami peningkatan sebesar 13,91% pertahun. Pertumbuhan tertinggi dicapai pada tahun 1998 sebesar 23,57%.

Pada tahun 2000 PDRB Kabupaten Aceh Barat atas dasar harga berlaku sebesar 1.150,93 milyar rupiah atau mengalami peningkatan sebesar 11,53% dibanding tahun 1999. Sedangkan tahun 1999 sendiri jika dibandingkan tahun sebelumnya mengalami peningkatan sebesar 12,03%. Ini berarti perubahan harga tahun 1999 dan tahun 2000 tidak jauh berbeda.

Perkembangan PDRB Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2000 apabila ditinjau dari harga konstan tahun 1993, sedikit mengalami pertumbuhan positif sebesar 1,47% yaitu dari 516,20 milyar rupiah tahun 1999 menjadi 523,76 milyar rupiah tahun 2000. Ini merupakan tahun pertama bagi kabupaten Aceh Barat mengalami pertumbuhan positif setelah dua tahun berturut-turut mengalami pertumbuhan negatif yaitu minus 2,89 tahun 1998 dan minus 1,08 tahun 1999.

Tabel 3.1. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Aceh Barat Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 1993, Tahun 1996-2000

Tahun	Atas Dasar Harga Berlaku (Rp. Juta)	Pertumbuhan (%)	Atas Dasar Konstan 1993 (Rp. Juta)	Pertumbuhan (%)
1	2	3	4	5
1996	673.145,31	11,70	508.706,81	8,47
1997	745.413,72	10,74	537.409,22	5,64
1998	921.085,70	23,57	521.862,55	-2,89
1999	1.031.931,93	12,03	516.201,93	-1,08
2000	1.150.934,60	11,53	523.765,08	1,47

Laju Pertumbuhan ekonomi kabupaten Aceh Barat selama periode tahun 1996-2000 rata-rata mengalami peningkatan sebesar

2,31% setiap tahunnya. Kecilnya rata-rata pertumbuhan dalam lima tahun terakhir ini disebabkan karena pada tahun-tahun negara Indonesia mengalami krisis ekonomi yaitu tahun 1998 dan 1999, Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Barat mengalami pertumbuhan negatif yaitu tahun 1998 sebesar minus 2,89% dan tahun 1999 sebesar minus 1,08 persen.

Namun pada tahun 2000 dimana kondisi perekonomian sudah mulai sedikit pulih, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Barat mampu mencapai angka positif yaitu sebesar 1,47%. Hal ini dapat dilihat bahwa delapan dari sembilan sektor ekonomi yang dicakup dalam PDRB sudah mengalami pertumbuhan yang positif. Sedangkan satu sektor lain yaitu sektor Pertanian mengalami pertumbuhan dibawah nol yaitu sebesar minus 2,35%. Hal ini disebabkan oleh sub sektor kehutanan yang selama ini memberikan kontribusi ketiga terbesar terhadap sektor pertanian mengalami pertumbuhan negatif sebesar minus 19,30%.

Selain sektor pertanian, rata-rata sektor ekonomi lainnya mengalami pertumbuhan antara satu sampai empat persen kecuali sektor keuangan, persewaan dan Jasa Perusahaan yang meningkat fantastis yaitu sebesar 75%. Ini disebabkan semakin baiknya kondisi perbankan pada tahun 2000 dan meningkatnya kontribusi yang diberikan terhadap PDRB oleh lembaga keuangan tanpa bank seperti asuransi.

Tabel 3.2. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Aceh Barat Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 1993 Tahun 1996 - 2000 (%).

No	Lapangan Usaha	1996	1997	1998	1999	2000
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pertanian	12,01	4,76	-0,21	0,38	-2,35
2.	Pertambangan dan Penggalian	6,26	13,33	-23,81	-3,33	2,15
3.	Industri Pengolahan	16,84	7,44	-1,27	-9,23	1,74
4.	Listrik dan air minum	9,77	44,43	8,47	4,36	4,01
5.	Bangunan/Kontruksi	4,18	7,78	-8,22	-18,51	2,32
6.	Perdagangan, hotel dan Restoran	3,61	11,63	-0,80	-4,30	3,33
7.	Pengangkutan dan komunikasi	2,22	3,49	4,05	2,51	3,56
8.	Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan	8,71	10,57	-77,42	180,47	75,33
9.	Jasa-jasa	1,63	0,16	0,30	0,38	1,20
	Pertumbuhan Ekonomi	8,47	5,64	-2,89	-1,08	1,47

c. Pendapatan Perkapita.

PDRB perkapita kabupaten Aceh Barat tahun 1999 ditinjau berdasarkan harga berlaku sebesar Rp. 2.737.161,89,- sedangkan tahun 2000 adalah Rp. 3.017.175,02,-, mengalami kenaikan jika dilihat PDRB perkapita berdasarkan harga konstan 1993 mengalami penurunan sebesar (-3,08) dibandingkan tahun 1999 yang PDRB perkapitanya sebesar Rp. 1.369.206,83,-. Begitu juga pendapatan regional mengalami penurunan dari Rp. 1.373.050,15,- berarti mengalami penurunan sebesar(-3,21).

d. Produktivitas Tenaga Kerja.

Produktivitas Tenaga Kerja (PTK) di kabupaten Aceh Barat dapat dilihat pada tabel 3.3 dan 3.4 berikut ini. Berdasarkan tabel 3.3

terlihat bahwa pertumbuhan produktivitas tenaga kerja periode 1998 – 1999 menurun 2,31% pertahun. Penurunan PTK diperkirakan terus mengalami penurunan yang cukup berarti sehingga pada periode 1998 – 1999 di atas 3,0% pertahun, sementara pertumbuhan selama 2000 – 2001 baru mulai sekitar \pm 1,0% jika keadaan ekonomi nasional dan keamanan daerah-daerah mulai pulih kembali.

Tabel 3.3 produktivitas Tenaga Kerja Menurut Sektor Tahun 1996 dan 1997 di kabupaten Aceh Barat (Juta rupiah/tahun)

No	Sektor	1998	1999	Pertumbuhan
1.	Pertanian	171.689	171.575	-0,001
2.	Pertambangan/penggalian	309	254	-0,178
3.	Industri	6.705	6.965	0,039
4.	Listrik Gas Air	269	388	0,443
5.	Konstruksi	3.156	3.252	0,030
6.	Perdagangan	28.012	28.365	0,013
7.	Komunikasi/Angkutan	4.200	4.344	0,033
8.	Keuangan	375	394	0,051
9.	Jasa	27.001	26.645	-0,013
10.	Lainnya	56	485	7,667
Jumlah		241.778	242.666	0,004

Jumlah tenaga kerja pada tahun 1999 adalah 242.666 orang yang terdiri dari sektor pertanian sebanyak 171.575 orang (80%), sektor pertambangan, sektor industri galian 7.219 (1,15%), sektor jasa 26.645 orang (5,45%) konstruksi 3.252 orang, perdagangan 28.365 orang, komunikasi/Angkutan 4.344 orang, keuangan 394 orang dan lainnya 485 orang.

Tabel 3.4 Proyeksi Produktivitas Tenaga Kerja menurut Sektor pada Awal Tahun 2000 – 2001 di Kabupaten Aceh Barat

No	Sektor	1998	1999	2000	2001
1.	Pertanian	171.689	171.575	170.689	
2.	Pertambangan/Penggalian	1.309	254	302	

3.	Industri	6.705	6.965	7.458
4.	Listrik Gas Air	269	388	402
5.	Konstruksi	3.156	3.252	4.021
6.	Perdagangan	28.012	28.365	28.389
7.	Komunikasi/Angkutan	4.206	4.344	4.502
8.	Keuangan	375	394	405
9.	Jasa	17.001	26.645	27.021
10.	Lainnya	56	485	23
Jumlah		241.778	242.666	243.212

B. Pertanian

Pembangunan pertanian sebagai sektor dasar di daerah ini memegang peranan penting dalam penghidupan dan kehidupan masyarakat, karena sebagian besar penduduk masih bergantung kepada sektor ini. Sejak Pelita V sampai dengan Pelita VI (PJP-1), pembangunan sektor pertanian telah membuahkan hasil yang cukup menggembirakan, baik dari hasil subsektor pertanian tanaman pangan, subsektor perkebunan, perikanan maupun dari subsektor peternakan. Hal ini dapat dilihat dari sumbangan pertanian terhadap PDRB kabupaten Aceh Barat yang cukup besar, walaupun kurun waktu terakhir ini menunjukkan adanya pergeseran-pergeseran dari sektor pertanian ke sektor ekonomi lainnya.

a. *Pertanian Tanaman Pangan*

Tabel SE-4A menyajikan neraca pertanian tanaman pangan kabupaten Aceh Barat. Pada tabel tersebut, jenis tanaman dikelompokkan yaitu tanaman biji-bijian/palawija, kelompok tanaman sayur-sayuran dan kelompok tanaman buah-buahan. Dari tabel SE-4A memperlihatkan bahwa produksi padi tahun 1999 sebanyak 1.478.789

ton dengan produktivitas per hektar adalah 4,10 ton, sedangkan pada tahun 1998 sebesar hanya 4,05 ton per hektar, dan luas panen padi pada tahun 1999 sebesar 360.640 hektar. Jagung 30.142 hektar, kedelai 84,636 hektar, kacang tanah 8.492 hektar, kacang hijau 33,49 hektar, ubi kayu seluas 5.928 hektar dan ubi jalar 33,90 hektar, dengan produksi per hektar masing-masing 4,10 ton/hektar, padi 2,42 ton/hektar, tanaman jagung dan 9,7 ton/hektar untuk tanaman ubi jalar. Sedangkan luas panen terkecil dari jenis tanaman biji-bijian, palawija, dan sampai saat ini padi ladang belum ada data yang akurat.

b. Perikanan

Pembangunan subsektor pertanian merupakan salah satu subsektor yang juga mempunyai peranan penting dalam perekonomian daerah terutama dalam memberikan sumbangan terhadap PDRB. Dilihat dari peta potensi perikanan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, kabupaten Aceh Barat memiliki potensi perikanan yang cukup potensial untuk pengembangan berbagai jenis kegiatan perikanan baik potensi perikanan laut, perikanan budaya (budidaya air payau, budidaya laut dan budidaya air tawar) dan perikanan perairan umum.

Dari neraca kabupaten Aceh Barat terlihat bahwa sebahagian besar hasil perikanan, baik yang berasal dari perikanan laut maupun perikanan darat, budidaya tambak, kolam dan sawah, umumnya digunakan untuk konsumsi daerah. Secara keseluruhan jumlah produksi perikanan tahun 1999 adalah 116.622 ton yang terdiri dari atas produksi perikanan laut sebesar 11.202,3 ton dan produksi perikanan darat

sebesar 459,9. Produksi perikanan darat terdiri dari produksi perikanan tambak 70,6 ton, produksi budidaya kolam 47,7 ton dan produksi perikanan perairan umum 341,6 ton. Dari jumlah produksi perikanan tersebut di atas dapat terlihat bahwa produksi perikanan perairan umum, merupakan produksi terbesar Rp. 105.317.141 jika dibandingkan dengan jumlah produksi dan nilai produksi tahun 1999 dengan tahun 1997, maka adanya kenaikan produksi sebesar 3,59%, sedangkan nilai produksinya meningkat sebesar 21,3%. Jenis produksi ikan laut terbesar yang terdapat di Kabupaten Aceh Barat yaitu tahun 1999, jumlah produksinya mencapai 11.201,3 ton, sedangkan pada tahun 1998 sebesar 11.008 ton.

Mengingat potensi perikanan laut maupun perikanan darat di Kabupaten Aceh Barat, peningkatan hasil perikanan masih dimungkinkan untuk dikembangkan dan ditingkatkan. Untuk memanfaatkan potensi tersebut perlu didukung dengan penyediaan fasilitas-fasilitas, baik fasilitas penangkapan maupun fasilitas lainnya di samping penggunaan teknologi tepat guna. Hal ini penting dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup para nelayan maupun pemasukan devisa negara.

c. *Peternakan*

Neraca peternakan meliputi ternak dan unggas. Jenis ternak yang dihimpun melalui tabel ini terdiri dari sapi, kerbau, kambing, domba, babi, kuda. Sedangkan untuk jenis unggas yang dihimpun adalah ayam kampung, ayam ras/petelur, ayam pedaging dan itik.

Dari tabel SE-6A dapat dilihat bahwa jumlah populasi stok ternak pada akhir tahun 1999 adalah ternak besar yaitu sapi 34.083 ekor, kerbau 63.212 ekor. Selanjutnya populasi stok ternak kecil yaitu kambing adalah 97,476 ekor, domba 13.337 ekor, unggas 1.870.600 ekor. Jika dibandingkan dengan populasi/stok akhir tahun dengan awal tahun, maka ada penurunan populasi masing-masing adalah ternak besar yaitu sapi sebesar 9,13% dan selanjutnya ternak kecil yaitu kambing terjadi penurunan sebesar 3,53% dan domba penurunan domba sebanyak 2,93%.

Dari tabel SE-6A menunjukkan bahwa pengurangan stok untuk ternak besar adalah sapi dan kerbau yang disebabkan karena adanya peningkatan pemotongan ternak, disamping juga adanya kematian ternak serta keterbatasan areal penggembala masyarakat. Sedangkan pengurangan stok untuk jenis ternak unggas yaitu ayam kampung dan itik sebagian besar disebabkan karena adanya pemotongan yang cukup besar.

Diantara berbagai jenis ternak, maka yang paling banyak stok pada akhir tahun untuk ternak besar adalah kerbau dan pada ternak kecil adalah kambing. Selanjutnya dapat dilihat bahwa jumlah produksi daging di kabupaten Aceh Barat tahun 1999 seluruhnya berjumlah 342.734 ton. Disamping itu produksi daging babi yang sampai saat ini belum ada datanya. Sedangkan untuk jenis ternak unggas produksi terendah adalah berasal dari produksi ayam ras/petelur.

d. Perkebunan

Pembangunan subsektor perkebunan merupakan bagian integral dari pembangunan pertanian telah memberikan kontribusi yang cukup besar dan berarti dalam peningkatan pendapatan petani, penyerapan tenaga kerja, peningkatan devisa negara, maupun penyediaan bahan industri dalam negeri. Dilihat dari potensi sumber daya lahan yang tersedia masih luas dan baru sebagian besar yang dimanfaatkan, sehingga dengan demikian dapat memberikan peluang bagi pembangunan pertanian dimasa yang akan datang. Pengembangan perkebunan di kabupaten Aceh Barat dapat digolongkan dalam dua kelompok, yaitu perkebunan rakyat dan perkebunan besar.

• Perkebunan Besar

Usaha pembangunan perkebunan besar di kabupaten Aceh Barat dapat dikategorikan dua kategori, yaitu perkebunan besar negara (PTP) dan perkebunan Swasta Nasional (PBSN). Dapat dilihat dari jenis tanaman perkebunan dikelompokkan dalam dua kelompok tanaman berumur panjang dan tanaman berumur pendek.

Pengembangan dan areal perkebunan besar, baik perkebunan besar negara maupun perkebunan swasta nasional di kabupaten Aceh Barat terdapat pada 9 (sembilan) kecamatan yaitu Kecamatan Kuala, Seunagan, Darul Makmur, Woyla, Samatiga, Teunom dan kecamatan Kaway XVI. Jenis komoditi yang diusahakan meliputi 5 komoditi yaitu karet, kelapa sawit, kakao, kopi dan pinang.

Dari luas areal perkebunan besar yang terdapat di kabupaten Aceh Barat tahun 1999 seluruhnya berjumlah 63.502,67 hektar dengan jenis tanaman yang diusahakan umumnya adalah jenis tanaman berumur panjang. Luas areal kelapa sawit setiap tahunnya terus meningkat dimana jumlah areal pada tahun 1999 seluruhnya adalah 18,031 hektar dengan jumlah produksi 55,354 ton, dimana produksi rata-rata yang dihasilkan setiap hektarnya adalah 3,75 ton minyak sawit.

Selanjutnya komoditi perkebunan besar memiliki luas areal terluas yang diusahakan adalah kelapa sawit dengan luas areal 18,031 hektar. Komoditi perkebunan kakao dengan luas areal pengembangannya mencapai 1,035 hektar, karet 13.300 hektar, kelapa 9.674 hektar, kopi dan pinang sebanyak 593 hektar.

- **Perkebunan Rakyat**

Jenis tanaman pada perkebunan rakyat terdapat dalam dua kelompok jenis tanaman yaitu yang panjang seperti karet, kelapa, kelapa sawit, kopi, coklat, kapok, pinang, lada dan kelapa hibrida. Sedangkan jenis tanaman berumur pendek yang diusahakan adalah tebu, tembakau, serih, nilam, kunyit dan jahe.

Jenis tanaman perkebunan rakyat yang diusahakan tersebut, diantaranya memiliki areal tanam yang cukup luas terutama jenis tanaman yang berumur panjang seperti kelapa, karet, cengkeh, kelapa sawit, coklat dan pinang.

Dari 7 (tujuh) jenis tanaman tersebut di atas, tanaman karet merupakan tanaman yang mempunyai areal paling luas yaitu 34.074 hektar dibandingkan dengan produksi kelapa sawit, maka produksi tanaman karet per hektar masih rendah yaitu total produksi yang dihasilkan 10.253 ton. Bila dilihat dari perkembangan areal, luas areal tanaman kelapa sawit mengalami kenaikan sebesar 8,5%, sedangkan tanaman karet hampir tidak bertambah lagi. Peningkatan tersebut, terutama terjadi pada areal perkebunan besar yaitu kelapa sawit, karena setiap tahun terus diadakan penambahan areal yang dilaksanakan oleh beberapa perusahaan di hampir setiap kecamatan dalam kabupaten Aceh Barat.

e. Produktivitas

Dari luas panen tanaman pangan di kabupaten Aceh Barat, sekitar 496.578 hektar dari luas panennya adalah merupakan luas panen padi sawah dengan jumlah produksi yang dihasilkan 1.478.789 ton dengan produktivitas rata-rata per hektar adalah 4,10 ton. Jika dibandingkan dengan beberapa komoditi biji-bijian lain seperti padi lalang, jagung, kacang kedelai dan kacang tanah, maka produktivitas padi sawah jauh lebih tinggi. Jumlah produksi jagung, kacang kedelai dan kacang tanah masing-masing 72,888 ton, 109.089 ton dan 9994 ton dengan jumlah produktivitas per hektar adalah 2,42 ton/hektar, 1,23 ton/hektar dan 1,18 ton/hektar.

Kelompok tanaman sayur-sayuran yang terdiri dari berbagai macam jenis kacang-kacangan merupakan jenis komoditas yang jumlah produksi lebih besar dibandingkan dengan jumlah produksi rata-rata per hektar 1,61 ton. Sedangkan produksi untuk jenis tanaman buah-buahan terbesar adalah komoditas durian, rambutan, jeruk, kuini, langsung dan lain-lain.

f. Penggunaan Pupuk

Pupuk merupakan salah satu sarana produksi pertanian yang cukup penting untuk meningkatkan produktivitas tanaman. Dilihat dari jenis pupuk, maka sebagian besar pupuk yang digunakan adalah terdiri dari Urea, TSP/SP36, ZA dan KCl. Jumlah pemakaian pupuk seluruhnya 31.125 ton yang penggunaannya berfungsi untuk tanaman pangan sampai September 1999 sebesar 15.232 ton dan pemakaian untuk tanaman perkebunan 1999 sebesar 21.720 ton.

Untuk tanaman perkebunan pupuk bervariasi, dimana jumlah pupuk paling banyak adalah pada tanaman kelapa sawit, yaitu total penggunaan pupuk rata-rata per hektar adalah 735 Kg. Sebaliknya penggunaan pupuk terendah adalah untuk tanaman perkebunan adaiah terdapat pada tanaman kopi yaitu 110 Kg/hektar.

BAB IV**SUMBER PENCEMARAN****Pendahuluan**

Pada dasar kegiatan yang merupakan penyebab terjadinya pencemaran lingkungan pada umumnya hampir sama di semua tempat yang kalau dikelompokkan terdiri dari 3 (tiga) kelompok besar yaitu :

- Kegiatan bidang Industri.
- Kegiatan bidang Pertanian/Perkebunan.
- Kegiatan bidang Domestik/Perkotaan.

Pencemaran berlangsung dimana-mana dengan laju kegiatan yang sangat cepat, sehingga menyentuh seluruh sendi kehidupan dan mempengaruhi siapa dan dimana saja.

Pencemaran yang terjadi di kabupaten Aceh Barat, meliputi pencemaran udara, pencemaran air dan pencemaran tanah. Berdasarkan jenis zat pencemarnya, maka dikelompokkan lagi menjadi bahan pencemar gas, cairan dan padat. Sumber pencemar tersebut relatif tetap seperti tahun sebelumnya.

Bahan pencemar yang berbentuk gas, terutama CO₂, CO, Nox, H₂S dan amoniak. Cairan sebagai bahan pencemar adalah bahan organik dan bahan anorganik sehingga dapat berpengaruh terhadap kadar BOD, COD, partikel terlarut, minyak dan lemak dalam perairan.

1. Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Aceh Barat.

Secara umum pencemaran lingkungan yang terjadi di kabupaten Aceh Barat, dapat dikategorikan belum mempengaruhi kehidupan manusia,

hal ini kami kemukakan karena sumber pencemaran dari Pabrik-pabrik besar masih belum tingkat mengkhawatirkan sekali, kecuali dari Industri kecil-kecil yang mempengaruhi beberapa biota air sungai yang pada akhirnya juga terkena dampaknya pada manusia terutama yang bermukim disekitar pabrik tersebut. Yang jelas nyata dan dirasakan oleh penduduk di Kota adalah gangguan limbah padat yang lebih menjurus kita arahkan saja ke sampah kota. Ini tentu bagian terbesar yang merasakannya adalah warga kota Meulaboh. Meskipun demikian kewaspadaan terhadap timbulnya pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas Industri/Pabrik kecil dan sampah kota terus dijaga.

2. Sumber Utama Pencemaran Udara.

Pencemaran udara terjadi di kawasan perkotaan, seperti kota Meulaboh dan Simpang Empat. Sebagai sumber utama pencemar adalah pembakaran BBM oleh mesin kendaraan bermotor. Zat pencemar utama adalah CO₂ dan CO.

Pencemaran udara juga terjadi di kawasan industri seperti di kecamatan Kuala, Darul Makmur dan sekitarnya. Pencemaran di kecamatan Kuala dan Darul Makmur bersumber dari PT. Socfindo.

Pencemaran udara juga terjadi di kawasan pemukiman, sebagai sumbernya adalah pembakaran sampah. Sedangkan di kawasan hutan dalam rangka pembersihan lahan. Walaupun demikian, data pencemaran udara dari sumber ini tidak diperoleh.

3. Sumber Utama Pencemaran Air

Penyebaran wilayah pencemaran air di kabupaten Aceh Barat, dikelompokkan menjadi kawasan pemukiman, perkotaan dan kawasa alami.

Pencemaran air sungai Krueng Nagan dan Krueng Meureubo, bersumber dari pabrik pengolahan hasil pertanian/perkebunan. Sedangkan bahan pencemar utamanya adalah bahan organik.

Kawasan pemukiman dan perkotaan pun merupakan sumber pencemaran air, yang bahan pencemarnya adalah bahan organik dan limbah rumah tangga sehingga meningkatkan BOD perairan sekitarnya

4. Sumber Utama Pencemaran limbah Padat dan Sampah Perkotaan.

Pencemaran limbah padat pada umumnya berbentuk sampah, baik yang berasal dari limbah kota maupun limbah rumah tangga. Sumber utama limbah padat ini adalah kawasan perdagangan/pasar dan kawasan pemukiman. Jumlah sampah dan limbah padat yang dihasilkan pada umumnya belum teridentifikasi secara baik. Sedangkan yang dapat diketahui secara kasar adalah limbah perkotaan dan pemukiman yaitu sekitar 1-2 Kg/orang per hari. Dengan demikian, sampah yang dihasilkan dikawasan perkotaan sesuai dengan jumlah penduduknya. Peningkatan jumlah penduduk, berarti meningkat pula jumlah sampah yang dihasilkan. Walaupun demikian sulit untuk diidentifikasi mana sampah rumah tangga dan mana sampah kota/perdagangan, karena penanganan limbah sampah tersebut masih belum dilakukan dengan cara terpisah antara sampah rumah tangga dengan sampah kota/perdagangan.

Disamping limbah padat sampah, limbah padat berupa debu (ash) dan proses pembakaran cangkang, serat dan tandan. Abu yang dikeluarkan dari bawah furnace (incenerator) biasanya dimanfaatkan pula untuk pupuk pohon sawit.

Besarnya tingkat pencemaran yang ditimbulkan memang besarnya relatif kecil. Akan tetapi karena kegiatan Pabrik ini berjalan terus-menerus maka pencemaran yang diakibatkan kegiatan Pabrik ini juga perlu diwaspadai. Karena dampaknya dalam kurun waktu yang agak lama juga akan mempertajam terjadinya penyakit pernapasan yaitu ISPA.

5. Jumlah Pencemaran Udara.

Jumlah pencemaran udara untuk berbagai parameter pada umumnya belum tersedia datanya, baik dari kadarnya disumber pencemar (emisi) maupun dari kadar pencemaran dilingkungan (ambient). Dengan demikian

belum dapat diketahui pola perubahan dan perilaku pencemaran udara disetiap kawasan.

6. Jumlah Pencemaran Air.

Jumlah pencemaran air untuk berbagai parameter, pada umumnya tersedia datanya, baik yang berasal dari sumbernya (efluen) maupun dari lingkungannya (ambien). Oleh sebab itu, tingkat pencemaran air di Kabupaten Aceh Barat juga belum diketahui. Namun untuk tahun anggaran 2001 kita akan dapat mengetahui tingkat pencemaran air yang disebabkan oleh kegiatan Pabrik Kelapa Sawit.

7. Pengendalian Pencemaran Udara.

Upaya pengendalian pencemaran udara dikawasan industri pengolahan kelapa sawit, dilakukan oleh setiap industri/pabrik. Sesuai dengan PP Nomor 51 Tahun 1993. Walaupun demikian, usaha ini masih menghadapi berbagai kendala antara lain kesadaran pemilik industri/pabrik dalam melaksanakan usaha tersebut terutama dalam pelaksanaan RKL - RPL / UKL - UPL dan pelaksanaan PP Nomor 51 Tahun 1993 yang masih perlu peningkatannya baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Disamping itu dipandang perlu secepatnya ditetapkan baku emisi sesuai dengan kemampuan daya dukung lingkungan. Penerapan uji emisi untuk kendaraan bermotorpun dipandang perlu untuk mengantisipasi menurunnya kualitas udara. Pemantauan kualitas udara di beberapa kota dan kawasan industri secara periodic dan teratur serta konsisten sangatlah mendesak untuk dilakukan.

8. Pengendalian Pencemaran Air.

Pengendalian pencemaran air dilakukan sejalan dengan adanya proyek kali bersih (prokasih) serta usaha pembinaan kebersihan kota antara lain penertiban pembuangan limbah rumah tangga yang berbentuk tinja.

Pengendalian pencemaran air dikawasan industri dilakukan oleh industri/pabrik itu sendiri. Hal ini diupayakan dengan diberlakukannya PP

Nomor 31 Tahun 1997, yaitu dengan mewajibkan bagi industri / pabrik untuk melaksanakan AMDAL, RKL – RPL / UKL – UPL secara bertahap dan berupaya meningkatkan pelaksanaan PP Nomor 31 Tahun 1997 secara konsekwen penetapan baku mutu limbah ini disesuaikan dengan kemampuan daya dukung lingkungan pun perlu segera ditindak lanjuti. Disamping itu, pemantauan kualitas perairan pun perlu juga dilakukan secara periodic dan teratur.

9. Pengendalian Limbah Padat Dan Sampah Perkotaan.

Dikawasan perkotaan, limbah padat dapat dikendalikan dengan pengadaan bak sampah di setiap pintu rumah atau toko. Kemudian sampah diangkut dan dikumpulkan disuatu tempat yaitu di tempat pembuangan akhir (TPA) untuk menunggu proses lebih lanjut. Pemrosesan akhir belum dilakukan karena sampai saat ini belum memperoleh sistem yang tepat, dan untuk sementara pemrosesan ini dilakukan dengan cara dibakar. Disamping dibakar juga dilakukan pemadatan dan perataan di TPA, dengan menggunakan alat berat seperti Dozer dan Skopel sehingga keadaan TPA dapat lebih bersih dan tidak meninggalkan bau yang tidak sedap. Nah, sisa hasil pemadatan dan perataan inilah yang di bakar, karena cara pemusnahan sampah dengan pembakaran ini banyak sekali menghadapi kendala sehingga masih perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Oleh sebab itu penanganan sampah ini perlu ditingkatkan dengan cara lebih baik, antara lain di TPA Ujong Barasok, sedangkan penanganan limbah tinja secara mekanik untuk kota Meulaboh telah direncanakan unit pengolahan limbah tinja.

Nomor 31 Tahun 1997, yaitu dengan mewajibkan bagi industri / pabrik untuk melaksanakan AMDAL, RKL – RPL / UKL – UPL secara bertahap dan berupaya meningkatkan pelaksanaan PP Nomor 31 Tahun 1997 secara konsekwen penetapan baku mutu limbah ini disesuaikan dengan kemampuan daya dukung lingkungan pun perlu segera ditindak lanjuti. Disamping itu, pemantauan kualitas perairan pun perlu juga dilakukan secara periodic dan teratur.

9. Pengendalian Limbah Padat Dan Sampah Perkotaan.

Dikawasan perkotaan, limbah padat dapat dikendalikan dengan pengadaan bak sampah di setiap pintu rumah atau toko. Kemudian sampah diangkut dan dikumpulkan disuatu tempat yaitu di tempat pembuangan akhir (TPA) untuk menunggu proses lebih lanjut. Pemrosesan akhir belum dilakukan karena sampai saat ini belum memperoleh sistem yang tepat, dan untuk sementara pemrosesan ini dilakukan dengan cara dibakar. Disamping dibakar juga dilakukan pemadatan dan perataan di TPA, dengan menggunakan alat berat seperti Dozer dan Skopel sehingga keadaan TPA dapat lebih bersih dan tidak meninggalkan bau yang tidak sedap. Nah, sisa hasil pemadatan dan perataan inilah yang di bakar, karena cara pemusnahan sampah dengan pembakaran ini banyak sekali menghadapi kendala sehingga masih perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Oleh sebab itu penanganan sampah ini perlu ditingkatkan dengan cara lebih baik, antara lain di TPA Ujong Barasok, sedangkan penanganan limbah tinja secara mekanik untuk kota Meulaboh telah direncanakan unit pengolahan limbah tinja.

5

BAB V

SUMBER DAYA ALAM

1. Penggunaan Lahan dan Perubahannya (konversi)

Kabupaten Aceh Barat memiliki luas 10.187 Km², dimana berdasarkan peruntukan luas tersebut dibagi atas kawasan budi daya dan kawasan non budi daya. Luas kawasan budi daya (kawasan lindung) pola penggunaan lahan di kabupaten Aceh Barat bersifat dinamis dengan kata lain bahwa pembinaan lahan dapat berubah tergantung pada dinamika pembangunan.

Penggunaan lahan budi daya masih didominasi oleh sektor pertanian, yaitu mencakup sekitar 51,01%, sedangkan penggunaan sektor lainnya (kampung/pemukiman) adalah 6,21%, dan lahan yang belum dimanfaatkan diperkirakan seluas 42,78%. Bila dibandingkan penggunaan lahan tahun 1997 dengan 1998, maka ada kenaikan sebesar 1,02%.

Kawasan hutan di kabupaten Aceh Barat pada awal tahun 1998 seluas 678.138 hektar. Kawasan hutan tersebut terdiri dari hutan konversi dan hutan negara bebas sebagai hutan lindung 171.160 hektar, sedangkan selebihnya dimanfaatkan untuk hutan produksi, hutan konservasi, kawasan

budi daya dan lain-lain. Sebagai hutan yang berubah fungsinya adalah hutan konversi yang sesuai dengan statusnya dapat berubah untuk penggunaan lainnya yaitu perkebunan dan transmigrasi.

Sudah menjadi kebiasaan areal penebangan di hutan produksi, setelah selesai maka produksi ditinggalkan begitu saja sambil menunggu rotasi berikutnya oleh pemegang HPH (sesuai dengan RKT). Untuk ini belum pernah ada survey tentang berapa besar penyusutan terjadi pada tahun produksi.

2. Sumber Daya Mineral dan Energi

Sesuai dengan Garis – Garis Besar Haluan Negara (GBHN), pembangunan di sektor pertambangan akan diarahkan pada pemanfaatan sebesar mungkin kekayaan hasil tambang bagi pembangunan nasional. Hal ini ditujukan bagi tersedianya bahan baku untuk industri dalam negeri guna meningkatkan ekspor serta penerimaan negara serta memperluas kesempatan berusaha/lapangan pekerjaan.

Pengelolaan dan pembangunan di sektor pertanian, perlu dilakukan secara terpadu dan serasi dengan pengembangan energi untuk pembangunan daerah dan pembangunan diberbagai sektor lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut, pembangunan disektor pertanian, perlu selalu diperhatikan untuk kebutuhan masa depan, pelestarian dan kemampuan lingkungan hidup serta keselamatan terhadap bencana alam dan geologis dengan disertai peningkatan pengawasan yang menyeluruh.

Pembangunan di sektor pertanian pada umumnya memerlukan modal yang cukup besar. Sehubungan dengan hal itu, penanaman modal swasta sektor pertanian perlu terus didorong dan ditingkatkan untuk dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pembangunan nasional.

Dalam Garis – Garis Besar Haluan Negara (GBHN), juga menetapkan agar pertanian rakyat diarahkan dan ditingkatkan pengelolaannya antara lain dengan penyuluhan, bimbingan dan pembinaan usaha yang memadai, termasuk pengembangan dan pembinaan koperasi pertanian rakyat. Usaha tersebut dimaksudkan untuk dapat memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Demikian juga halnya dengan pembangunan tenaga listrik dan sumber daya energi lainnya yang dititik beratkan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik di perkotaan maupun di pedesaan dan sekaligus mendorong kegiatan ekonomi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka akan ditingkatkan lagi pemerataan pemanfaatan tenaga listrik secara berhasil guna dan berdaya guna.

Di kabupaten Aceh Barat, terdapat beberapa bahan galian logam dan bahan galian non-logam, baik secara indikasi maupun yang diketahui dengan pasti. Bahan galian tersebut tersebar antara lain di kecamatan Kaway XVI, Seunagan, Beutong dan Woyla. Dari inventarisasi telah diketahui bahwa adanya sebaran mineral logam dasar tembaga (Cu), timbal (Tb), timah (fn), emas, batu bara, logam, besi dan paduan besi- besi.

Diantara mineral logam yang mempunyai efek yang cukup baik yaitu tembaga pasir, besi, mangan dan molibdenum.

Sebaran mineral primer terdapat pada mineralisasi sepanjang pengunungan Bukit Barisan, sedangkan endapan-endapan sekunder berupa endapan placer terdapat di aliran sungai, antara lain di Krueng Seunagan, Pulo Raga, kecamatan Kuala dan Seunagan serta kecamatan Kaway XVI.

Pertambangan di daerah Tingkat II Aceh Barat masih belum berkembang disebabkan karena pada umumnya kegiatan kuasa pertambangan masih dalam tahap eksplorasi. Lokasi bahan galian itu sendiri jauh terpencil dan pada umumnya belum ada sarana jalan. Di samping itu untuk usaha pertambangan memerlukan modal besar, tenaga ahli dan tenaga pelaksana yang terampil, sarana dan prasarana serta waktu yang cukup lama (5 – 10 tahun) dengan memerlukan teknologi yang tinggi.

Perkembangan kegiatan pertambangan bahan galian golongan C baru terbatas pada galian sirtu. Perkembangan kegiatan usaha, perkembangan bahan galian golongan C di kabupaten Aceh Barat belum terbina sebagaimana yang diharapkan, sebab masih dijumpai pengambilan / penambangan liar (non SIPD) yang telah dilindungi dengan surat izin pertambangan daerah, terutama pada jenis bahan galian dan batu (sirtu), kerikil, koral dan sebagainya.

Kegiatan usaha pertambangan bahan galian golongan C untuk bahan konstruksi langsung dapat dirasakan manfaat oleh pemerintah daerah dan masyarakat di kabupaten Aceh Barat, di samping telah meningkatkan

kesejahteraan masyarakat dalam bidang usaha tambang dan pengembangannya yang cukup besar, karena tidak memerlukan alat pengolah, seperti penambangan pasir, kerikil, batu belah dan sejenisnya.

▪ Energi Listrik

PT. PLN (Persero) Cabang Meulaboh mendapat tugas mengelola kelistrikan yang ada di kabupaten Aceh Barat dan memiliki unit-unit organisasi yang meliputi ranting-ranting yaitu :

1. Ranting Teunom yang meliputi kecamatan Teunom, Krueng Sabee, Setia Bakti, Sampoiniet dan kecamatan Jaya.
2. Ranting Seunagan meliputi kecamatan Seunagan Jaya, Beutong dan kecamatan Darul Makmur.
3. Ranting Meulaboh yang meliputi kecamatan Johan Pahlawan, Samatiga, Kaway XVI, Woyla dan Sungai Mas.

Jumlah lokasi pembangkit tenaga diesel mencapai 11 lokasi PLTD, dengan jumlah pelanggan tahun 1999 adalah 40.400 pelanggan. Daya terpasang sebesar 14.256 kwh, daya mampu 10.577 kwh dan beban puncak 12.506 kwh.

Menyangkut dengan listrik pedesaan disampaikan bahwa dari jumlah 707 desa yang terdapat di kabupaten Aceh Barat sudah dapat dialiri listrik sebanyak 659 desa atau sekitar 91%. Dari penjelasan secara umum di atas tampak bahwa untuk kebutuhan listrik di kabupaten Aceh Barat keseluruhannya memakai bahan bakar minyak.

3. Sumber Daya Air

Sumber daya air selain merupakan sumber daya alam juga merupakan ekosistem yang sangat penting bagi kehidupan dan perilaku manusia, termasuk kegiatan pembangunan. Kebutuhan air cenderung semakin meningkat dari waktu ke waktu, baik untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti untuk air minum, air bersih dan sanitasi maupun sebagai sumber daya yang diperlukan bagi kegiatan pembangunan ekonomi seperti pertanian, industri, pembangkit listrik dan pariwisata.

Di kabupaten Aceh Barat air yang dipergunakan untuk berbagai kebutuhan dan keperluan hingga saat ini dan untuk kurun waktu mendatang masih mengandalkan pada sumber air permukaan dan air tanah.

Pada tahun 1999 air tanah yang diproduksi sebesar 375 l/d, sedangkan pada akhir tahun 1998 masih di bawah 200 l/d, sementara itu pendataan sumber air permukaan justru sangat terbatas sehingga tidak muncul pada publikasi ini. Untuk mengatasi kesulitan air minum di Kota Meulaboh dan sekitarnya, hal ini sudah menjadi tanggung jawab pemerintah dan instansi terkait di dalamnya.

Penggunaan sumber daya air sebagian besar untuk irigasi/pertanian, meliputi kecamatan Seunagan, Beutong, Kuala dan Teunom.

Penambahan endapan sumber daya air mineral dari curah hujan, sehingga ketersediaannya sangat terbatas pada faktor alam Oleh

karenanya untuk menjaga ketersediaan air pemerintah dan masyarakat perlu bersama-sama menjaga kelestarian hutan.

4. Kawasan Konservasi

Kawasan konservasi adalah kawasan hutan berupa kawasan cagar alam, suaka, margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, daerah pengungsian satwa, yang karena keadaannya perlu konservasi (di lindung, di awetkan dan dimanfaatkan) sedemikian rupa sehingga keberadaan kawasan tersebut dapat mendukung terselenggaranya proses-proses ekologis yang penting bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk lainnya.

Berdasarkan Undang – undang No. 5 Tahun 1990 tentang konversi Sumber Daya Alam hayati dan ekosistem, maka kawasan konservasi dibagi kawasan pelestarian alam.

5. Dinamika Flora dan Fauna

Kondisi flora di kabupaten Aceh Barat pada tahun 1999 masih cukup baik. Masih sedikit sekali penelitian yang dilakukan terhadap potensi flora dan fauna. Untuk satwa yang dilindungi hingga saat ini baru beberapa jenis dapat dilindungi diantaranya adalah Kucing Emas, Mawas, Rusa dan Kijang Gluh dan lain-lain.

Izin pemeliharaan satwa yang dilindungi juga belum dievaluasi mengenai pemeliharaannya. Untuk tahun 2000 ada beberapa izin

membawa keluar daerah satwa yang dilindungi dikeluarkan/diberikan karena pemiliknyanya bertambah.